

**ANALISIS PERJANJIAN KERJA LAUT ANAK BUAH KAPAL
TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG KEPেলাUTAN
(STUDI DI WILAYAH PELAYARAN KOTA TANJUNGPINANG)**

Oleh

**Tri Marno Butarbutar
NIM. 2105040044**

ABSTRAK

Perjanjian kerja laut merupakan dasar hukum yang mengatur hubungan kerja antara pemilik kapal dan anak buah kapal, dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Meskipun secara normatif telah diatur melalui berbagai peraturan, implementasi perjanjian ini di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu persoalan utama adalah belum optimalnya perlindungan terhadap hak-hak normatif anak buah kapal, seperti jaminan sosial, asuransi, serta kepastian upah yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak dan kewajiban ABK dalam perjanjian kerja laut dan mengevaluasi sejauh mana pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap instansi yang berwenang, yaitu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun perjanjian kerja laut telah memiliki dasar hukum yang memadai, pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari ideal. Ditemukan adanya praktik pelanggaran, seperti pemberian upah di bawah standar, tidak adanya perlindungan kecelakaan kerja, dan minimnya akses terhadap jaminan sosial. Kurangnya pemahaman hukum dari pihak anak buah kapal juga menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan yang lebih intensif dan peran aktif pemerintah agar hak-hak anak buah kapal dapat terpenuhi secara adil dan merata.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja Laut, Kepelautan, Ketentuan.

**ANALYSIS OF SEAFARERS' EMPLOYMENT AGREEMENTS IN
RELATION TO GOVERNMENT REGULATION
NUMBER 7 OF 2000 CONCERNING SEAFARING
(Study in the Sailing Area of Tanjungpinang City)**

By

**Tri Marno Butarbutar
NIM. 2105040044**

ABSTRACT

The seafarer employment agreement serves as a legal foundation that governs the employment relationship between shipowners and crew members, with the primary goal of ensuring that the rights and obligations of both parties are fulfilled. Although this agreement is normatively regulated through various legal instruments, its practical implementation still faces significant challenges. One of the main issues is the inadequate protection of the crew's normative rights, such as access to social security, insurance coverage, and fair wages. This study aims to analyze the legal provisions regarding the rights and obligations of crew members in seafarer employment agreements and to assess the extent to which their implementation aligns with the provisions of Government Regulation Number 7 of 2000 concerning Seafaring. This research employs a normative-empirical method, with data collected through literature review and interviews with relevant authorities, namely the Harbormaster and Port Authority Office Class II Tanjungpinang. The findings indicate that although the seafarer employment agreement is supported by adequate legal frameworks, its implementation remains far from ideal. Violations such as substandard wages, lack of occupational accident protection, and absence of social security access are still prevalent. Moreover, the limited legal awareness among crew members further hinders enforcement. Therefore, more intensive supervision and an active role from the government are required to ensure that the rights of crew members are fulfilled fairly and comprehensively.

Keywords: Seafarer Employment Agreement, Seafaring, Provisions.